

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMENHUB (BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU - KEPRI) TERHADAP
FUNGSI TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Yoseph Freinademetz Amsila
NPM : 137110614

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Adapun judul Skripsi saya yang berjudul **”Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau - Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun dari teoritisnya. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar Skripsi ini lebih mendekati pada kesempurnaan.

Skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

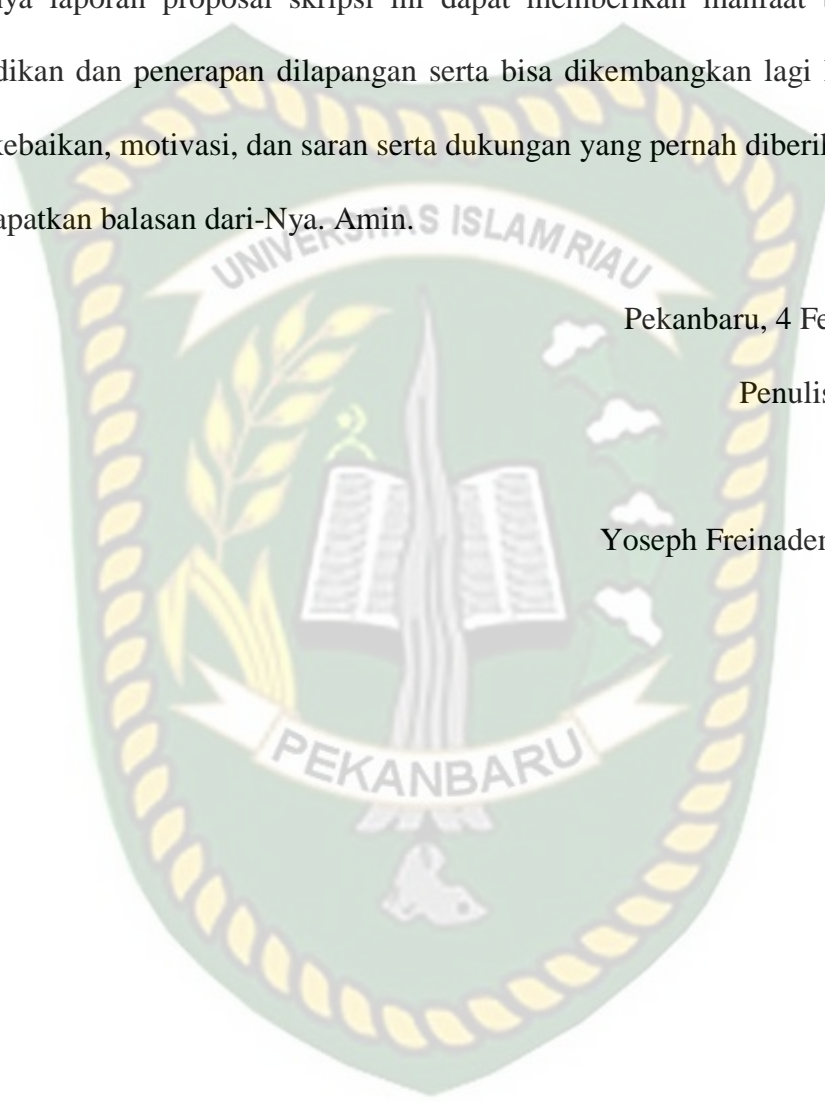
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis melalui saran yang diberikan selama penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Rosmita, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis melalui saran yang diberikan selama penyelesaian Skripsi ini.
6. Para dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Terkhususnya kupersembahkan Orang Tua tercinta Paulus Kelo Sila dan Eni Susilowati serta adik-adik Ester Lina Amsila, Christano Fisher Amsila, Bastian Julio Amsila yang tak henti-hentinya mendukung dan membantu penulis dalam segi materi maupun doa' do'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
8. Yang tercinta Indri Dwi Lestari, S.E yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2013 Kelas D yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Atas kebaikan, motivasi, dan saran serta dukungan yang pernah diberikan, semoga mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Pekanbaru, 4 Februari 2019

Penulis

Yoseph Freinademetz Amsila



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Administrasi	21
2. Konsep Organisasi.....	26
3. Konsep Manajemen.....	31
4. Konsep Pengawasan	38
5. Fungsi Terminal	41

6. Tipe Terminal.....	42
B. Kerangka Pikir	43
C. Hipotesis.....	44
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel	47
F. Teknik Pengukuran.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Teknik Penarikan Sampel.....	51
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	53

BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	55
B. Gambaran Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri	57
1. Profil Singkat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri	58
2. Tugas Dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri	60
3. Susunan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri	61

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	69
1. Identitas Responden Berdasarkan Umur	69
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub	

(Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	74
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	82
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Jumlah Bus dan Penumpang yang Berangkat Tahun 2014-2016 Dari Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	14
I.2 : Daftar Jumlah PO/Bus yang aktif dan tidak aktif pada Tahun 2018 di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	16
II.1 : Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.	48
III.1 : Penetapan Populasi dan Sampel Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	51
III.2 : Jadwal Kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	54
IV.1 : Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2018	56
V.1 : Jumlah Responden Pegawai menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	70
V.2 : Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	70
V.3 : Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	71
V.4 : Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	72
V.5 : Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri)	

	Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	73
V.6 :	Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru menurut jenis kelamin dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	74
V.7 :	Distribusi tanggapan Responden pemilik perusahaan oto bus mengenai indikator pengawasan langsung tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	75
V.8 :	Daftar Jumlah Perusahaan Oto Bus (PO) yang aktif dan tidak aktif pada Tahun 2018 di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	76
V.9 :	Distribusi tanggapan Responden pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru mengenai indikator Pengawasan Tidak Langsung tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	79
V.10 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Persahaan Oto Bus di Pekanbaru tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru	44
IV.1 : Susunan Struktur Organasasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri (Satuan Pelayanan)	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1	Daftar Kuisisioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau Dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 96
2	Daftar Wawancara (Untuk Responden Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepala Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau 102
3	Rekap Telly Penelitian penelitian Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 105
4	Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau Dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru 107
5	Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Nomor: 246/Uir-Fs/kpts/2017 Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Uir 112
6	Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/Dpmpmsp/Non Izin-Riset/15299 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi..... 113
7	Sk Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri : UM.002/II/8/BPTD-IV/2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi..... 114
8	Surat keputusan dekan fisipol uir nomor : 149/UIR-FS/KPTS/2020 Tentang : Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa..... 112

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoseph Freinademetz
NPM : 137110614
Program Studi : Ilmu Administrasi publik
Jenjang pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Februari 2019

Pelaku Pernyataan,



Yoseph Freinademetz

**PENGAWASAN KEMENHUB (BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH IV PROVINSI RIAU DAN KEPRI) TERHADAP
FUNGSI TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

YOSEPH FREINADEMETZ

NPM: 137110614

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki berfungsi sebagai infrastruktur untuk transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan kedatangan dan keberangkatan orang serta mengatur angkutan umum. Tetapi kenyataannya banyak pengemudi angkutan tidak menggunakan terminal, mereka lebih suka menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Departemen komunikasi transportasi dan Informatika Pekanbaru sehingga terminal tidak berjalan sesuai dengan fungsi semula. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru pada tahun 2018 dan faktor-faktor apa saja yang membatasi pengawasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru pada tahun 2018 dan membatasi faktor-faktor dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru 2018 belum dilakukan dengan maksimal. Itu terlihat dari pengawasan pihak-pihak terkait yang telah dilakukan tetapi masih banyak pengemudi bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang yang tidak ada di terminal. Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah sumber daya manusia, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Pengawasan, fungsi terminal

SUPERVISION OF THE MINISTRY OF RELIGION (RIAU AND KEPRI PROVINCE LAND TRANSPORTATION MANAGEMENT) ON TERMINAL FUNCTIONS OF TYPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI, PEKANBARU

ABSTRACT

YOSEPH FREINADEMETZ

NPM: 1371106140

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki functions as infrastructure for road transportation for the purpose of loading and lowering the arrival and departure of people and organizing public transportation. But in reality many transport drivers do not use the terminal, they prefer to raise and lower passengers outside the terminal. This often happens because of the lack of supervision carried out by the Ministry of transportation and Information Communication Pekanbaru so that the terminal does not run according to its original function. Based on this phenomenon, the formulation of the problem in this study is how the supervision of the Regional Transportation Management Office Region IV Riau Province and the Riau Islands to the function of the public transportation Terminal Payung Sekaki Pekanbaru in 2018 and what factors limit supervision.

The purpose of this study is to investigate the supervision of the Regional IV Land Transportation Management Office of Riau Province and the Riau Islands in the function of the public transportation Terminal at Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru in 2018 and limit the factors in supervision. This study uses a qualitative descriptive method approach. In collecting data, researchers used interview, observation and documentation techniques.

The results of the supervision study of the Land Transportation Management Region IV of Riau Province and Riau Islands on the function of the 2018 Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru public transport terminal have not been carried out to the maximum. It can be seen from the supervision of related parties that have been done but there are still many bus drivers who raise and drop passengers who are not in the terminal. The factors that influence supervision are human resources, leadership and community participation.

Keywords: Supervision, terminal functions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Dasar, dan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut pasal 18 tentang kependudukan pemerintahan daerah dalam Undang-undang 1945 berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang di atur dengan Undang-undang.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menganut kebijakan yang mendorong pengembangan Otonomi Daerah sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh Daerah sesuai sebagebutuhan.Hal ini dilakukan agar tujuan dari pembangunan daerah dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka diperlukan juga suatu sarana organisasi.Pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dari desentralistik ke arah dekonsentrasi pada hakekatnya dalam rangka dekonsentrasi pelimpahan sebagian

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan yang semula terakumulasi di tangan pemerintah daerah telah bergeser ke pemerintah pusat, termasuk didalamnya kewenangan dibidang teknis perhubungan.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal social dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26km² dengan jumlah penduduk 894,225 jiwa dan terdiri dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru.

Dalam hal ini perkembangan di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung misalnya transportasi. Dalam perkembangan transportasi dari tahun ke tahun selalu meningkat, baik itu dari segi bentuk maupun fungsinya yang semakin canggih dan multifungsi. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, social, politik dan mobilitas yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dari sektor tersebut. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri.

Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan “ *delivered demand* “ artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain, melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

Hal ini sesuai dengan diadakannya suatu pemerintah yaitu pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk melayani dirinya sendiri sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah dengan rakyat, semakin baik pada pelayanan yang diberikan. Jika pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan menjadi cepat. Untuk itu dalam suatu pemerintah diperlukan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diemban kepadanya sehingga dapat menciptakan pemerintah yang benar-benar sesuai dengan diadakannya pemerintah itu sendiri.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sehingga organisasi pemerintah disebut sebagai lembaga tempat pelayanan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak dari pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat. Kemudian mampu mengkoordinir segala yang ada tuntutan yang meningkatnya tugas dan

tanggung jawab semua aparaturnya baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau juga telah berusaha membenahi bidang transportasi tersebut. Kondisi ini dilakukan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan lalu lintas. Terbukti dengan prestasi yang didapat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dibidang lalu lintas yaitu sudah tujuh kali berturut-turut Kota Pekanbaru menerima Piala Wahana Tata Nugraha (WTN). Prestasi dibidang lalu lintas menurut motivasi pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga dan membenahi lalu lintas serta pengembangan sistem transportasi di Kota Pekanbaru.

Seiring berkembangnya Kota Pekanbaru kebutuhan transportasi sangat meningkat, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Disamping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman disepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua stakeholder. Sehingga nantinya akan terwujud suasana transportasi yang harmonis di wilayah Pekanbaru. Salah satu sarana dan prasarana yang paling penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah terminal angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Umum. Terminal tersebut berfungsi sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi yang dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsinya mendapat pembinaan dan pengawasan dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut dibentuk Organisasi pada Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri sebagai salah satu bagian dan struktur dari Kementerian Perhubungan yang merupakan unit kerja menertibkan lalu lintas jalan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 154 Tahun 2016 pada pasal 4 memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perhubungan yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran.
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kemudian pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

“Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan”

Selanjutnya struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

IV Provinsi Riau dan Kepri adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Analis kepegawaian penyedia
 - b. Analis kepegawaian pelaksana lanjutan
 - c. Analis kepegawaian pelaksana
 - d. Penyusun rencana dan pelaporan
 - e. Penelaah kehumasan dan publikasi
 - f. Pengelola ketatausahaan
 - g. Pengelola kepegawaian
 - h. Pengelola urusan kerumahtanggaan

- i. Pengelola keuangan
- j. Pengelola data dan sistem informasi
- 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - a. Pengawas pengujian, pemeriksaan dan Perawatan
 - b. Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan
 - c. Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - d. Pengevaluasi kinerja prasarana LLAJ
 - e. Pengadministrasi umum
- 4. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Penelaah manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - b. Pemroses data angkutan
 - c. Analis Keselamatan LLAJSDP
 - d. PPNS
 - e. Pengolah Data Pengawasan
- 5. Kepala Seksi Transportasi SDP Komersial dan Perintis
 - a. Penyusun bahan Perencanaan Pembangunan
 - b. Pengawas pembangunan prasarana LLASDP
 - c. PPNS
 - d. Pemroses data angkutan
 - e. Penyusun laporan monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJSDP
 - f. Penganalisa tarif jasa kepelabuhanan
 - g. Pengawas kinerja operasional pelabuhan
- 6. Terminal Penumpang Tipe A Kelas I
 - a. Koordinator Terminal Tipe A Kelas 1
 - b. PKB pelaksana lanjutan
 - c. PKB pelaksana
 - d. Pengelola administrasi perkantoran
 - e. PPNS
 - f. Pengelola teknologi informasi
 - g. Petugas K3
 - h. Teknisi bangunan
 - i. Petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat
 - j. Pengatur lalu lintas
 - k. Petugas pelayanan
 - l. Teknisi elektrik
 - m. Teknisi mekanikal
- 7. Terminal Penumpang Tipe A Kelas II
 - a. Koordinator Terminal Tipe A Kelas II
 - b. PKB pelaksana lanjutan
 - c. PKB pelaksana
 - d. Pengelola administrasi perkantoran
 - e. PPNS
 - f. Pengelola teknologi informasi

- g. Petugas K3
 - h. Petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat
 - i. Pengatur lalu lintas
 - j. Petugas pelayanan
 - k. Teknisi terminal
8. Terminal Penumpang Tipe A Kelas III
- a. Koordinator Terminal Tipe A Kelas III
 - b. PKB pelaksana lanjutan
 - c. PPNS
 - d. Petugas K3
 - e. Pengadministrasian umum
 - f. Pengelola teknologi informasi
 - g. Pengatur lalu lintas
 - h. Teknisi terminal
9. UPPKB Kelas I
- a. Koordinator UPPKB Kelas I
 - b. PKB pelaksana lanjutan
 - c. PKB pelaksana
 - d. Pengelola administrasi perkantoran
 - e. PPNS
 - f. Pengelola teknologi informasi
 - g. Petugas K3
 - h. Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran barang
 - i. Pengatur lalu lintas
 - j. Teknisi elektrik
 - k. Teknisi mekanik
 - l. Petugas penimbangan kendaraan bermotor
10. UPPKB Kelas II
- a. Koordinator UPPKB Kelas II
 - b. PKB pelaksana
 - c. Pengelola administrasi perkantoran
 - d. PPNS
 - e. Pengelola teknologi informasi
 - f. Petugas K3
 - g. Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran barang
 - h. Pengatur lalu lintas
 - i. Teknisi UPPKB
 - j. Petugas penimbangan kendaraan bermotor

11. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersial
 - a. Koordinator Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersial
 - b. Pengelola administrasi perkantoran
 - c. Pemroses data angkutan
 - d. Pengelola SISPRO pelayanan jasa kepelabuhanan
 - e. Petugas lalu lintas angkutan dan jasa kepelabuhanan
 - f. Pengawas kinerja operasional pelabuhanan
 - g. Pengawas keamanan dan ketertiban pelabuhanan
 - h. Pengawas fasilitas dan peralatan pelabuhanan
 - i. Pengawas bongkar muat dari dan ke kapal
 - j. Petugas keselamatan kapal
 - k. Operator radio komunikasi
12. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis Kelas I
 - a. Koordinator Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis Kelas I
 - b. Pengelola administrasi perkantoran
 - c. Petugas lalu lintas angkutan dan jasa kepelabuhanan
 - d. Pengadministrasi kedatangan dan pemberangkatan kapal
 - e. Petugas pemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan
 - f. Pengawas bongkar muat dari dan ke kapal
 - g. Petugas keselamatan kapal
 - h. Operator radio komunikasi
 - i. Teknisi bangunan
 - j. Teknisi elektrik
 - k. Teknisi mekanik
13. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis Kelas II
 - a. Koordinator Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis Kelas II
 - b. Pengelola administrasi perkantoran
 - c. Petugas lalu lintas angkutan dan jasa kepelabuhanan
 - d. Pengadministrasi kedatangan dan pemberangkatan kapal
 - e. Petugas pemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan
 - f. Pengawas bongkar muat dari dan ke kapal
 - g. Petugas keselamatan kapal
 - h. Operator radio komunikasi
 - i. Teknisi elektrik
 - j. Teknisi mekanik
14. Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau
 - a. Koordinator pelabuhan angkutan sungai dan danau
 - b. Pengelola administrasi perkantoran
 - c. Inspektur sungai dan danau
 - d. Pengawas lalu lintas dan angkutan penyeberangan

- e. Pengawas keamanan dan ketertiban pelabuhan
- f. Teknisi elektrikal
- g. Teknisi mekanikal

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak di capai oleh Kementerian Perhubungan, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua stakeholder. Sehingga nantinya akan terwujud suasana transportasi yang harmonis di wilayah Kota Pekanbaru. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya. Sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian keempat Pasal 33 Ayat (1), “untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal”. Dan kemudian pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 143, “ terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara”. Dasar hukum juga diatur pada Peraturan Pemerintah RI nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Menteri nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan pada pasal 3 standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yaitu :

- a. Pelayanan keselamatan
- b. Pelayanan keamanan

- c. Pelayanan kehandalan dan keteraturan
- d. Pelayanan kenyamanan
- e. Pelayanan kemudahan dan keterjangkauan
- f. Pelayanan kesetaraan

Serta Peraturan Menteri nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, mengklarifikasikan Terminal menjadi 3 tipe yaitu :

Tipe terminal penumpang terdiri dari :

- a. Terminal penumpang tipe A
- b. Terminal penumpang tipe B
- c. Terminal penumpang tipe C

Menjelaskan terdiri dari :

- a. Terminal Penumpang tipe A, adalah Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan Kota (ANGKOT), dan angkutan Pedesaan (ANGDES).
- b. Terminal penumpang tipe B, adalah Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan Kota (ANGKOT), dan angkutan Pedesaan (ANGDES).

- c. Terminal penumpang tipe C, adalah Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Pedesaan (ANGDES).

Salah satu sarana dan prasarana yang paling penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah terminal angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Terminal tersebut berfungsi sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi yang dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsinya mendapat pembinaan dan pengawasan .

Adapun pengawasan terhadap aktifitas terminal yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri nomor 56 Tahun 2017 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dirjen Pehubungan Darat Kementerian Perhubungan yang menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhitung dari Januari 2017, dimana salah satu uraian tugas pengawasan tersebut mengenai pengawasan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan teknis operasional terminal Tipe A kelas II.

2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data / informasi sebagai bahan laporan.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal Tipe A kelas II.
4. Melakukan pengelolaan ketatausahaan Terminal Tipe A kelas II
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Terminal Tipe A kelas II
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara berkala
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tujuan dibangunnya terminal BRPS ini antara lain agar seluruh kendaraan angkutan umum (bus), baik yang akan berangkat maupun yang akan datang seluruhnya masuk ke terminal.

Adapun jumlah bus dan penumpang yang berangkat dari terminal BRPS ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Daftar Jumlah Bus dan Penumpang yang Berangkat Tahun 2015-2017 Dari Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

Tahun	Jenis Kendaraan	Pertahun	
		Bus (unit)	penumpang (orang)
2015	AKAP	14.704	80.143
	AKDP	36.371	38.974
	JUMLAH	51.075	119.117
2016	AKAP	13.234	95.634
	AKDP	26.558	23.396
	JUMLAH	39.792	119.030
2017	AKAP	8.176	68.854
	AKDP	6.675	22.761
	JUMLAH	14.851	91.615

Sumber: Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru 2018

Pengoperasian Terminal Bandar Raya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru dari sejak dibangun belum berfungsi secara optimal, dimana sebagian besar bus tidak mau masuk dan menurunkan penumpang, walaupun oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri telah melakukan beberapa kali penertiban dan seiring perjalanannya banyak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan terminal ini tidak dimaksimalkan, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri bersama pengelola terminal yaitu Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru telah berulang kali melakukan sosialisasi dengan cara turun ke lokasi terminal bayangan tersebut untuk dapat mengarahkan penumpang ke Terminal BRPS Pekanbaru untuk melakukan aktifitas naik turunnya penumpang, hal ini dapat dilihat berdasarkan pengamatan penulis dimana adanya suatu gejala-gejala yang timbul terhadap penggunaan dan pemanfaatan terminal tersebut, salah satu nya yaitu masih banyaknya armada pengangkutan orang yang memberangkatkan penumpang dan menurunkannya dari atau ke pekanbaru tanpa melalui terminal. Kemudian adanya terminal bayangan, hal ini dapat dilihat dari pengambilan penumpang yang dilakukan tidak melalui terminal, menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis lokasi bayangan ini terletak di berbagai ruas jalan yaitu seperti di Simpang Pasar Pagi Arengka, Jalan H.R Soebrantas Simpang Panam (Batas barat Kota Pekanbaru-Kampar), Jalan Harapan Raya, Simpang Rumbai (Simpang Bingung), dan di Jalan Riau (Simpang Tabungan). Hal tersebut terjadi karena selama dipindahkannya terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ketempat yang baru pada tahun 2006, pemilik angkutan maupun supir armada Antar Kota Antar

Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang ada merasa penghasilannya menurun. Sebab-sebab terjadinya penurunan penghasilan karena kurang dioptimalkannya fungsi terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini. Jadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru selaku pengelola sekaligus pengawas di lingkungan terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini berperan penting dalam hal pengawasan fungsi terminal termasuk kedatangan dan keberangkatan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Dengan luasnya penggunaan lahan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan mampu memberikan kontribusi pelayanan transportasi khususnya penyediaan terminal yang sebelumnya sering menjadi permasalahan. Terwujudnya pembangunan ini juga mengharapkan terciptanya ketertiban dan keteraturan para pemilik angkutan/organda (PO) dalam mengoperasikan kendaraannya. Terminal ini berfungsi melayani perpindahan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan daftar jumlah Perusahaan Oto Bus (PO) yang aktif dan tidak aktif di Terminal BRPS sebagai berikut :

Tabel I.2 Daftar Jumlah Perusahaan Oto Bus (PO) yang aktif dan tidak aktif pada Tahun 2018 di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

NO	NAMA PO YANG AKTIF	NAMA PO YANG TIDAK AKTIF
1	ALS	Dolo Sordang
2	BENGKULU KITO/PUTRA RAFLESIA	HANDOYO.GROUP
3	BINTANG UTARA	JAYA UTAMA

NO	NAMA PO YANG AKTIF	NAMA PO YANG TIDAK AKTIF
4	IDOLA	KURNIA/ANUGERAH
5	IMI	PMH
6	INTRA	SAMPAGUL
7	KURNIA ANUGERAH/PMTOM	MANDALA/HANDOYO.B
8	LORENA	HD TRANSPOTASI
9	MAKMUR	TOP
10	MEDAN JAYA	ANEKA JAYA
11	CV.PELANGI ATRAKANA	SUMBA PUTRA
12	PUTRA PELANGI	SAMOSIR PRIBUMI
13	RHEMA ABADI	PMP
14	SEMPATI STAR	YANTI GROUP
15	SAN	PELITA TRANSPORT
16	TKB	GUMARANG
17	PMS	SIBUAL-BUALI
18	PUTRA SIMAS	PASMA JAYA
19	RAJAWALI	KASMA JAYA
20	RAPI	BINTER TRANSPORT
21	PUTRI RIAU	RNS
22	SINAMAR TRANSPORT	BAHAGIA
23	HARMONIS/LINTRA	
24	SETANGKAI	
25	USAHA BARU	
26	HARMONI	
27	SARI JAYA	
28	PUTRA SAMOSIR JAYA	
29	LINTAU TRANSPORT	
30	INDAH KARYA	
31	KARMILA PRATAMA	
32	TABEK BIRU	
33	LUBUK BASUNG EXPRES	
34	SKR JAYA TRANSPORT	

Sumber: Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru 2018

Dari data yang diperoleh terlihat bahwa banyak PO yang aktif pada terminal BRPS sebanyak 34 PO dan yang tidak aktif sebanyak 22 PO. Kemudian dari PO yang aktif di terminal masih ada yang menurunkan dan menaikkan penumpang di

luar lingkungan terminal seperti; PO. Lorena, PO. ALS, P.O Handoyo, dan P.O Putra Pelangi. Dari hal tersebut diindikasikan masih kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri terhadap pembangunan dan fungsi Terminal BRPS Pekanbaru.

Hal ini dengan ditemukan berbagai fenomena-fenomena yang penulis temukan di lapangan antara lain :

1. Banyak dari fasilitas yang berada di Terminal tidak diperhatikan oleh pihak Terminal itu sendiri (Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru) seperti Loker pembelian tiket, wc, ruang tunggu penumpang, ruang untuk ibu menyusui, dll.
2. Adanya pihak bus Antar Kota Antar Provinsi(AKAP) atau Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP) mencari penumpang atau menurunkan penumpang diluar terminal ataupun di jalan.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri dan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru terhadap PO yang berada diluar Terminal yang menyebabkan pihak PO masih mencari penumpang diluar Terminal.

Untuk itu berdasarkan dari fenomena diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian sebagai berikut “Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang pengawasan.

- b. Sebagai bahan masukan khususnya bagi kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam mengawasi fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- c. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Konsep Administrasi

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,2003;2)

Administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan – kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (Brooks Adam, 1913)

Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahannya sumber daya manusia dan sumber – sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (E.N. Gladden, 1953).

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan

konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Sedangkan menurut Herbert A. Simon menyebutkan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama(dalam Pasolong 2007:2). Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

The Liang Gie mendefenisikan administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu(dalam Inu Kencana, 2003:4) . Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasanya dalam suatu administrasi ada terdapat suatu proses kerjasama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

Pasolong (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Sedangkan menurut Sugandha administrasi negara adalah:

“Merupakan sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerja sama dengan dan

melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi”(dalam Amin Ibrahim, 2004:10).

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ;adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi uantuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukanseperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. Menurut Wirman

(2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Sedangkan administrasi dipandang dalam arti sempit dapat dicermati dari definisi berikut:

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli. 2005;16).

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam Pasolong 2010:7).

Sedangkan menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong 2010:7) mendefinisikan administrasi publik, adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Rosenbloom and Goldavan mengatakan bahwa administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat (dalam Wirman 2012:20). Sedangkan menurut Levine, Peter, and Thomson berpendapat administrasi publik memusatkan perhatiannya ada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka (dalam Wirman 2012:21).

Sedangkan Menurut Siagian (2003;7) administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Jadi kesimpulannya, administrasi adalah suatu proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan administrasi publik adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislative, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan public, manajemen publik, administrasi pembangunan tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

2. Konsep Organisasi

Selanjutnya organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian,2003;6)

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri – sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk

tercapainya tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut E. Wight Bakke Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya. (dalam Kusdi. 2009;5)

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Chester L. Bernard mendefinisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006:19).

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar

sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Banyak yang mendefinisikan pengorganisasian menurut Siswanto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah

“Berdasarkan deskripsi tentang organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian

lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien”(Siswanto 2005:75).

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi.

Dasar hubungan yang bersifat informal menurut Siagian (2003;96) antara lain adalah :

1. Hubungan yang didasarkan pada Personal Relations
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi.

2. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka

4. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian-bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

Jadi kesimpulannya, organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendaya gunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian,2003;5).

Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain menurut George R. Terry (dalamSunyoto;2015;2).

Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut George R. Terry (dalam Sunyoto;2015;2).

Manajemen adalah rangkaian aktivitas – aktivitas yang dikerjakan oleh anggota – anggota organisasi untuk mencapai tujuannya (Wilson Bangun, 2008).

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Stoner manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005:28).

Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah :Ketatalaksanaan, manajemen, *management* dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu “Manajemen” mengandung tiga pengertian:

- Manajemen sebagai suatu proses
- Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

G.R Terry mengatakan, secara esensial seorang menejer adalah seorang ilmuan dan seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya (dalam Siswanto. 2005;10).

Suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Rangkaian aktivitas dimaksudkan adalah merupakan fungsi seorang manajer. Fungsi manajer tersebut membentuk suatu proses keseluruhan.

Menurut Siswanto (2005;23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya dapat di lihat dari dua arah , yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut berikut :

1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.
2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan, ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.

Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan, administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Handoko. 2009;8).

Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner telah mengatakan kata proses, bukan seni. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan . manajemen dikatakan sebagai proses karena semua manejer . tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tujuan yang mereka inginkan.

Handoko (2009;8) mengatakan, proses tersebut terdiri dari kegiatan kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Henri Fayol mengatakan, bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi fungsi utama manajemen. (dalam Handoko.2009;21)

Sedangkan menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 5 fungsi yang menurut penulis paling penting yaitu :

1. Perencanaan, rencana rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu

untuk melaksanakan tugas tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Manajemen publik adalah suatu kinerja yang kompleks dari aktor-nya yakni pemerintah dan pegawai-pegawainya guna melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam hal ini kegiatannya tidak dilakukan karena profit atau keuntungan tetapi karena kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi.

Secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah (Keban, 2004). Manajemen publik merupakan ranah pemerintah dalam mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai keefektifan dan keefisienan. Woodrow Wilson mengemukakan mengenai poin-poin yang ada dalam suatu manajemen publik dimana dalam manajemen publik, pemerintah adalah sebagai

setting utama dalam organisasi. Pemerintah yang mengatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Fungsi eksekutif merupakan fokus utama dalam manajemen publik. Prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi dan yang terakhir adalah metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik.

Menurut Ott, Hyde dan Shafritz (1980) mengemukakan bahwa secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah publik. Manajemen publik ini ada sebagai konsekuensi adanya kebijakan publik untuk diimplementasikan. Manajemen publik diperlukan untuk mengatur hal tersebut. Manajemen publik yaitu proses yang menggerakkan sumber daya yang ada dan non-manusia sesuai dengan kebijakan publik.

Owen mengatakan bahwa manajemen publik tidak termasuk di dalamnya administrasi, namun menggunakan atau melibatkan organisasi sebagai aktor atau badan dalam pengaturan sehingga dalam pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan bisa dengan maksimal dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Penekanan dalam pengetahuan ini adalah bahwa manajemen publik murni sebuah pengaturan dan bukan sebagai sistem administrasi, namun dalam pelaksanaannya menggunakan organisasi sebagai bentuk keteraturan.

Dalam pelaksanaannya manajemen publik mengadopsi ilmu-ilmu yang ada dalam manajemen bisnis guna menciptakan keefisienan dan keefektifan kinerja. Tetapi dalam hal ini masih membawa tugas mereka sebagai pelayan rakyat.

Jadi kesimpulannya manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Pengawasan

Walaupun perencanaan, menyusun organisasi, menjuruskan dan mengkoordinasi pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap perlu bagi manajemen untuk mengadakan “control” pengawasan dan penelitian atas segala macam pekerjaan itu.

“control” tidaklah berarti mengontrol saja, namun meliputi juga aspek penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, lengkap dengan rencananya, kebijaksanaan, program dan lain sebagainya dari pada manajemen.

Handoko (2003:359), mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) performa pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011:109) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang

dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Pengawasan menurut Siagian (didalam Adisasmita Rahardjo, 2011) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008:115-116) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan Langsung, ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report.
2. Pengawasan Tidak Langsung, ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk lisan dan tertulis.

Batasan pengawasan yang lain seperti menurut Robein (didalam Syafiie, 2011:110) bahwa yang dimaksud pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pendapat lain menurut Siagian (dalam Syafiie, 2011:110) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi pengawasan menurut Syafiie (2011:112) adalah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

Menurut Sukarna (2011:110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terakup arti pembimbingan, penertiban, dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur tertib, terarah atau tidak.

Pendapat lain tentang pengawasan seperti menurut Herujito (2001:242) memberikan definisi pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan pengawasan menurut Herujito (2001:243) dengan empat cara yaitu :

1. Mengawasi langsung ditempat

2. Melalui laporan
3. Melalui tulisan
4. Melalui penjagaan khusus

Menurut Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dilihat dari :

1. Pembimbing
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Jadi kesimpulannya, pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

5. Fungsi Terminal

Terminal adalah titik simpul berbagai moda angkutan, sebagai titik perpisahan penumpang dari moda satu kemoda yang lain atau dari berbagai moda kesuatu moda, juga suatu titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun melanjutkan berjalan ketempatlain, rumah atau pasar, dengan kata lain terminal adalah suatu titik henti.

Menurut Marlok (1991, P.271) menyatakan ada beberapa fungsi terminal secara umum antara lain :

1. Memuat penumpang/barang keatas kendaraan serta membongkar/menurunkannya termasuk memindahkannya dari satu kendaraan ke kendaraan lain/dari moda angkutan satu ke moda angkutan lain.

2. Menampung penumpang dan barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat.

- Kemungkinan untuk memproses barang, seperti mengelompokkan, membungkus dan memberikan label dan selanjutnya untuk diangkut.
- Menyediakan keamanan dan kenyamanan penumpang (misalnya : pelayanan makan dan sebagainya)

3. Menyimpan kendaraan dan komponen lainnya, memelihara dan menentukan tugas selanjutnya.

4. Menyediakan dokumentasi perjalanan meliputi :

- Menimbang muatan, menyiapkan rekening, memilih rute.
- Menjual tiket penumpang, memeriksa pesanan ditempat.

5. Mengumpulkan penumpang dan barang didalam grup-grup berukuran ekonomis untuk diangkat (misalnya untuk memenuhi kereta api atau pesawat udara) dan menurunkan mereka setelah tiba ditempat tujuan.

6. Tipe Terminal

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, tipe terminal penumpang terdiri dari :

1. Terminal Penumpang Tipe A

Terminal penumpang tipe A kewenangan Menteri, melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)

dan/atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

2. Terminal Penumpang Tipe B

Terminal penumpang tipe B kewenangan Gubernur, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

3. Terminal Penumpang Tipe C

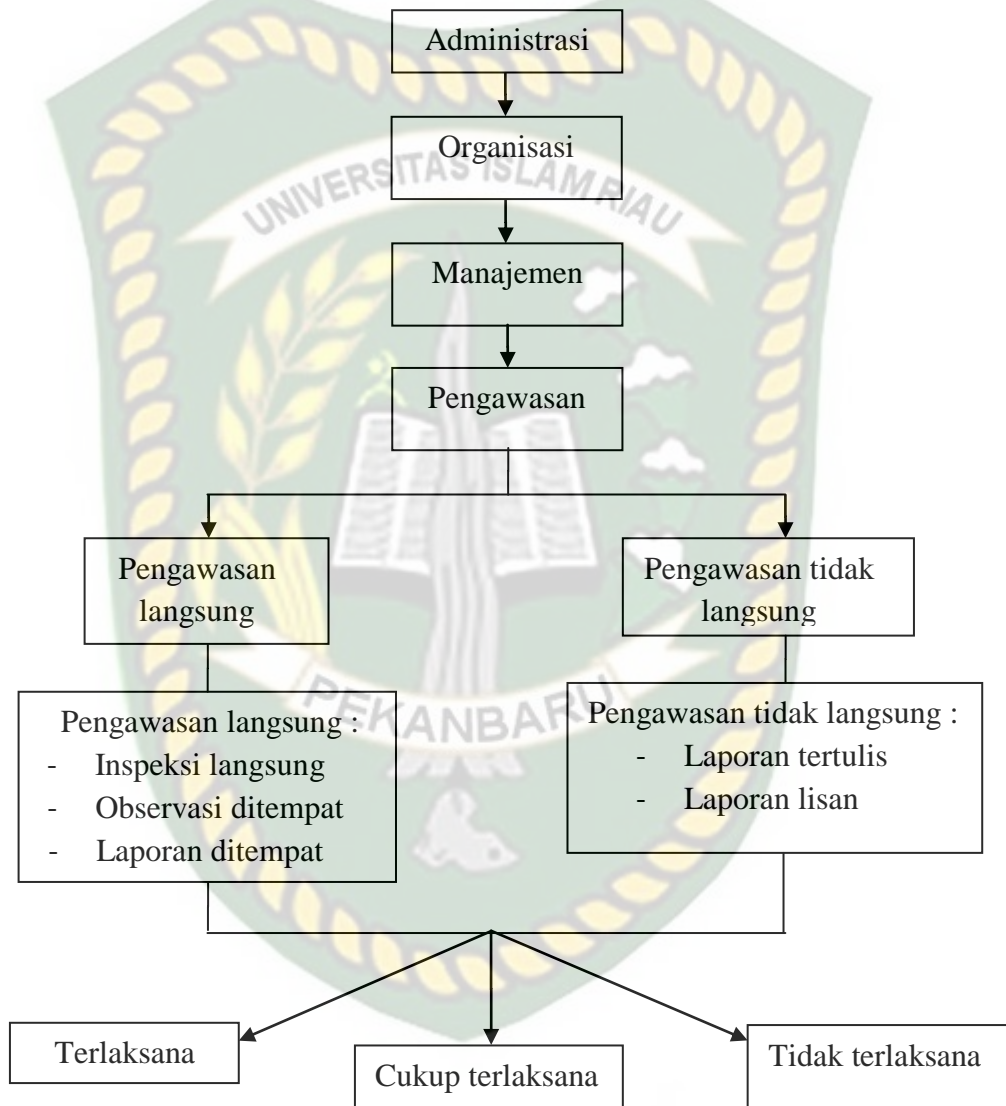
Terminal penumpang tipe C kewenangan Bupati/Wali Kota berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

3. Kerangka Pikir

Pelaksanaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa peranan suatu instansi merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu peranan. Adapun kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram di bawah ini :

KERANGKA PIKIRAN

Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru



4. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni : Diduga Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya

Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, sehingga terjadi aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

5. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut :

- a. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
- b. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
- c. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
- d. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah serangkaian tugas dan fungsi yang dijalani Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri.
- e. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bagaimana perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

- f. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan.
- g. Balai Pengelola Transportasi Darat yang dimaksud disini Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri.
- h. Adapun Indikator penelitian yang ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pengawasan langsung
 - a. Inspeksi Langsung yaitu mendatangi langsung ke Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - b. On the spot observation/observasi ditempat yaitu pengamatan langsung ke Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
 - c. On the spot report/Laporan ditempat yaitu meminta laporan langsung dari instansi terkait mengenai undang-undang dan larangan bagi kendaraan penumpang umum dan atau barang untuk berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang diluar terminal, pangkalan, dan tempat pemberhentian serta penerapan fungsi terminal guna mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

2. Pengawasan tidak langsung

- a. Laporan tertulis yaitu menerima laporan berkala dari instansi terkait mengenai undang-undang dan larangan bagi kendaraan penumpang umum dan atau barang untuk berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang diluar terminal, pangkalan, dan tempat pemberhentian serta penerapan fungsi terminal guna mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.
- b. Laporan lisan yaitu meminta penjelasan secara lisan dari instansi terkait mengenai undang-undang dan larangan bagi kendaraan penumpang umum dan atau barang untuk berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang diluar terminal, pangkalan, dan tempat pemberhentian serta penerapan fungsi terminal guna mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

E. Operasional Variabel

Tabel II.I : Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala pengukuran
pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar	Pengawasan	A. Pengawasan langsung	- Inspeksi langsung	Terlaksana
			- Observasi langsung	Cukup terlaksana
			- Laporan ditempat	Tidak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala pengukuran
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian,2008:115-116)		B.Pengawasan tidak langsung	- Laporan tertulis - Laporan lisan	terlaksana

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran variable ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%) dengan tiga kategori yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, Tidak Terlaksana. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Dilihat dari tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki bidang angkutan dan fasilitas terminal BRPS di Kota Pekanbaru.
 - Terlaksana : Apabila semua item penelitian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 67%-100%
 - Cukup terlaksana : Apabila 2 dan 3 item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 34%-66%
 - Tidak terlaksana : apabila hanya satu atau tidak satupun dari item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 0%-33%
- b. Dilihat dari dampak langsung pelaksanaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki di bidang angkutan umum di Kota Pekanbaru.

Terlaksana : Apabila semua item penelitian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila 2 dan 3 item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 34%-66%

Tidak terlaksana : apabila hanya satu atau tidak satupun dari item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 0%-33%

c. Dilihat dari konsekuensi lain diluar rencana pelaksanaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki di bidang angkutan di Kota Pekanbaru.

Terlaksana : Apabila semua item penelitian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila 2 dan 3 item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 34%-66%

Tidak terlaksana : apabila hanya satu atau tidak satupun dari item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif melalui penggambaran sitematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada padaPengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Survey dibatasi pada penelitian yang dasarnya dikumpulkan dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian, disebabkan bahwa menurut penulis terdapat adanya permasalahan terhadap fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan sampel yang dengan sengaja menentukan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap bias mewakili populasi yang ada. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut seperti responden yang tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan kuisisioner yang telah disusun oleh penulis mengenai fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru.

Table III.1: Penetapan populasi dan sampel Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

NO	Respoden	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri	1	1	100%
2	Kepala Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	1	1	100%
3	Pemilik Angkutan (PO)	34	30	88%
	Jumlah	36	32	

Sumber : Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

1. Untuk pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, serta Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dan sub-sub populasi menurut pihak terkait yang dianggap dapat mengetahui dan mewakili kewenangan.
2. Untuk Pihak PO, penulis juga menggunakan metode Purposive Sampling dengan cara langsung turun ke lapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari para responden, yang mana data ini terdiri dari identitas responden berisi jenis kelamin, umur, masa kerja, tingkat pendidikan serta hasil tanggapan

responden tentang Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari Kantor yang terdiri dari gambaran umum kantor, fasilitas yang tersedia, uraian tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dan struktur organisasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para responden.
2. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung atau terjun langsung ke lokasi yang dijadikan tempat penelitian.
4. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data berdasarkan dari hasil laporan, buku-buku, dan sumber yang ada pada Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana Pengawasan Kemenhub(Balai

Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variabel dengan tipe kuantitatif.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru seperti yang tertera pada rincian penggunaan waktu perkegiatan di tabel berikut ini :

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu/2018															
		Feb-Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survy																
6	Survy Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian(Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi peneliti 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. . Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada titik koordinat $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Secara geologi, Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Dan Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai seperti Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur lalu lintas perekonomian.

Sedangkan iklim di Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berada pada bulan Agustus 2018 dan suhu minimum di bulan Februari 2018. Jumlah hari hujan dan curah hujan cukup berfluktuasi selama tahun 2018. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada November sedangkan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November juga.

Secara administratif Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabuptan Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Ibu Kota Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru, dan jarak Kota pekanbaru

dari beberapa Kota disekitar Kota Pekanbaru antara lain :

1. Pekanbaru – Taluk = 118 km
2. Pekanbaru – Rengat = 159 km
3. Pekanbaru – Pkl. Kerinci = 33,5 km
4. Pekanbaru – Siak = 74,5 km
5. Pekanbaru – Bangkinang = 51 km
6. Pekanbaru – Ps. Pengaraian = 128 km
7. Pekanbaru – Bagan = 192 km
8. Pekanbaru – Dumai = 125 km
9. Pekanbaru – Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan beberapa jarak kota yang lainnya.

Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan, berikut adalah daftar Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel IV.1 : Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2018

NO	Kecamatan District	Luas (km²) Total Area Large (Square.km)	Persentase Percentage
1	2	3	4
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Lima Puluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52

1	2	3	4
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru		632,26	100,00

Sumber : Pekanbaru dalam angka, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa di Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan dan tabel diatas menunjukkan luas wilayah di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Jalan Sudirman karena lokasi tersebut berdasarkan sistematika atau operasional PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru berdasarkan wilayah (yang ditetapkannya wilayah administrasi dan teknis). Dan lokasi penelitian di Jalan Sudirman tepatnya di wilayah 2 yang ditentukan berdasarkan sistem atau operasional dari PDAM Tirta Siak tersebut.

B. Gambaran Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri

1. Profil Singkat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka sejak tanggal 21 Juli 2017 dengan di tandai dengan pelantikan pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat se Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor SK. 707 Tahun 2017 dan SK. 715 Tahun 2017 maka dibentuklah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri. Mulai saat itu untuk pertama kalinya Pejabat dan Staf Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri memiliki kantor yang beralamat di Jl. Cemara No. 57, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Pekanbaru 28132 sampai dengan saat ini.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Balai Pengelola Transportasi Darat, maka tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri bagian Kedua Pasal 3 :
 - a. Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial
2. Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, maka tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri bagian Pasal 4 :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran

- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan yang menjadi visi misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri adalah sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdayasaing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia

- b. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

2 Susunan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terdiri dari :

- 15. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A
- 16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - k. Analis kepegawaian penyedia
 - l. Analis kepegawaian pelaksana lanjutan
 - m. Analis kepegawaian pelaksana
 - n. Penyusun rencana dan pelaporan
 - o. Penelaah kehumasan dan publikasi
 - p. Pengelola ketatausahaan
 - q. Pengelola kepegawaian
 - r. Pengelola urusan kerumahtanggaan
 - s. Pengelola keuangan
 - t. Pengelola data dan sistem informasi
- 17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - f. Pengawas pengujian, pemeriksaan dan Perawatan
 - g. Penyusun Bahan Perencanaan Pembangunan
 - h. Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - i. Pengevaluasi kinerja prasarana LLAJ
 - j. Pengadministrasi umum
- 18. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - f. Penelaah manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - g. Pemroses data angkutan

- h. Analis Keselamatan LLAJSDP
- i. PPNS
- j. Pengolah Data Pengawasan
- 19. Kepala Seksi Transportasi SDP Komersial dan Perintis
 - h. Penyusun bahan Perencanaan Pembangunan
 - i. Pengawas pembangunan prasarana LLASDP
 - j. PPNS
 - k. Pemroses data angkutan
 - l. Penyusun laporan monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJSDP
 - m. Penganalisa tarif jasa kepelabuhanan
 - n. Pengawas kinerja operasional pelabuhan
- 20. Terminal Penumpang Tipe A Kelas I
 - n. Koordinator Terminal Tipe A Kelas 1
 - o. PKB pelaksana lanjutan
 - p. PKB pelaksana
 - q. Pengelola administrasi perkantoran
 - r. PPNS
 - s. Pengelola teknologi informasi
 - t. Petugas K3
 - u. Teknisi bangunan
 - v. Petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat
 - w. Pengatur lalu lintas
 - x. Petugas pelayanan
 - y. Teknisi elektrik
 - z. Teknisi mekanik
- 1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A selaku kepala Organisasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat.

- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
- c. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan.
- d. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional.
- e. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- g. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- h. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

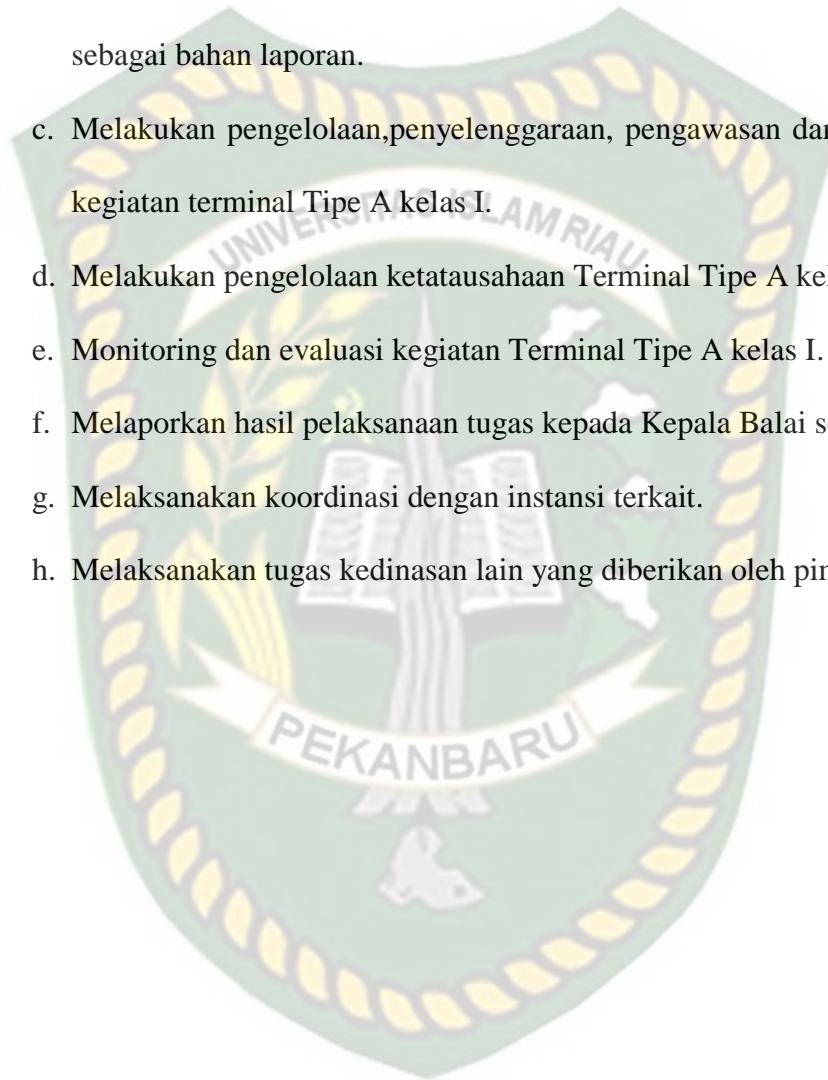
- i. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
 - j. Melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
 - k. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun Bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A.
 - b. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal barang.
 - c. Menyusun penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

- d. Menyiapkan Bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - e. Menyiapkan Bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan.
 - f. Menyiapkan Bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.
 - b. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi.
 - c. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang.
 - d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - f. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan.
- b. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- c. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP.
- d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- f. Menyusun bahan pelayanan jasa kepelabuhanan sungai, danau, dan penyeberangan.
- g. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- h. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Koordinator Terminal Tipe A Kelas I mempunyai tugas yaitu :
- a. Merencanakan teknis operasional terminal Tipe A kelas I (rencana kerja).
 - b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan laporan.
 - c. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal Tipe A kelas I.
 - d. Melakukan pengelolaan ketatausahaan Terminal Tipe A kelas I.
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan Terminal Tipe A kelas I.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara berkala.
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Tabel Gambar IV.1 : Susunan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri (Satuan Pelayanan)



Sumber:

Satuan Pelayanan
Terminal Tipe A Bandar
Raya Payung Sekaki

Kota Pekanbaru 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum membahas lebih jauh BAB V ini, maka terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas data lengkap. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri dan pemilik Perusahaan Oto Bus. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas responden dengan memperhatikan :

1. Identitas Reponden Berdasarkan Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebu tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk itu diperlukan mengetahui data tingkat umur pegawai dan pemilik perusahaan oto bus sehingga dapat membantu mendapatkan hasil relevan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawahnya ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	20-30 Tahun	-	-
2	31-40 Tahun	1	50%
3	41-50 Tahun	1	50%
4	50 Tahun ke atas	-	-
Jumlah		2	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 31-40 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 50%, usia 41-50 berjumlah 1 orang dengan persentase 50%. Dapat disimpulkan data responden pegawai menurut tingkat umur didominasi pada umur 31-40 tahun. Tingkat umur mempengaruhi produktifitas masing-masing pegawai.

Hasil penelitian Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.2 : Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru menurut tingkat umur dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	20-30 tahun	8	27%
2	31-40 tahun	19	63%
3	41-50 tahun	3	10%
4	50 tahun ke atas	-	-

Jumlah	30	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas reponden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru jika dipandang dari tingkat didominasi dengan umur 41-50 tahun berjumlah 3 orang dengan presentase 10%, sedangkan umur 31-40 berjumlah 19 orang dengan presentase 63%, dan umur 20-30 berjumlah 8 orang dengan presentase 27%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri mengenai tingkat pendidikan ini, maka dapat dilihat tingkat pendidikan pegawainya adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 : Jumlah Responden Jumlah Responden Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SLTP	-	-
2	SMA	-	-
3	Diploma 3	-	-
4	Strata 1	1	50%
5	Strata 2	1	50%
Jumlah		2	100%

Sumber: Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Tabel V.3 diatas menjelaskan untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan bagi pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri menunjukkan bahwa pada tabel diatas responden berpendidikan Strata 1 sebanyak 1 orang atau dengan persentase 50%, sedangkan tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 1 orang atau dengan persentase 50%.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan tinggi hingga terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik. oleh karena itu diharapkan para pegawai dapat bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

Tabel V.4 : Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal TipeA Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SLTP	-	-
2	SMA	27	90%
3	Diploma 3	-	-
4	Strata 1	3	10%
5	Strata 2	-	-

Jumlah	30	100%
--------	----	------

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan bagi pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tabel diatas responden berpendidikan SMA sebanyak 27 orang atau dengan persentase 90%, responden berpendidikan tingkat Strata 1 sebanyak 3 orang atau dengan persentase 10%

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin pria dan kelamin wanita. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja, dimana pria biasanya lebih cepat emosional dari pada wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri dan pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawah ini :

Tabel V.5 : Jumlah Responden Jumlah Responden Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		2	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Pada tabel V.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri, jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi jumlahnya dari pada perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang atau dengan persentase 100%.

Tabel V.6 : Jumlah Responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru menurut jenis kelamin dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	30	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Pada tabel V.6 dapat diketahui bahwa untuk responden Pemilik Perusahaan Oto Bus di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel diatas untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang atau dengan persentase 100%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dalam mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru maka penulis menetapkan, pemilik perusahaan oto bus sebagai responden dalam penelitian ini

Untuk melihat Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi

Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang dijadikan indikator adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung sedangkan yang menjadi item dinilai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam hal pengawasan langsung seperti penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi tanggapan Responden pemilik perusahaan oto bus mengenai indicator pengawasan langsung tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Sub indicator	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Inspeksi langsung	8 (27%)	12 (40%)	10 (33%)	30 100%
2	Observasi langsung	10 (33%)	15 (50%)	5 (17%)	30 100%
3	Laporan ditempat	7 (23%)	14 (47%)	9 (30%)	30 100%
Jumlah		25	41	24	90
Rata-Rata		8	14	8	30
Persentase		27%	47%	26%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.7 diatas dapat diketahui indikator pengawasan langsung diperoleh tanggapan responden pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru, yang terdiri dari tiga item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari :Terlaksana dengan jumlah persentase 27%, atau ada 8 orang responden, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang responden, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 26% atau ada 8 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator pengauwasan langsung yaitu Cukup Terlaksanadengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Terlaksana dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari hasil observasi dan data kuisisioner, penulis mendapatkan data tanggapan responden yang lebih dominan pada skala cukup terlaksana pada persentase 47% dalam pelaksanaan pengawasan langsung oleh instansi terkait yaitu pihak BPTD dimana pihak terkait sudah melakukan tindakan berdasarkan SOP yang seharusnya seperti inspeksi, observasi dan laporan terhadap PO Bus yang terdata dengan data sebagai berikut:

Tabel V.8 : Daftar Jumlah Perusahaan Oto Bus (PO) yang aktif dan tidak aktif pada Tahun 2018 di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

NO	NAMA PO YANG AKTIF	NAMA PO YANG TIDAK AKTIF
1	ALS	Dolo Sordang
2	BENGKULU KITO/PUTRA RAFLESIA	HANDOYO.GROUP
3	BINTANG UTARA	JAYA UTAMA

NO	NAMA PO YANG AKTIF	NAMA PO YANG TIDAK AKTIF
5	IMI	PMH
6	INTRA	SAMPAGUL
7	KURNIA ANUGERAH/PMTOM	MANDALA/HANDOYO.B
8	LORENA	HD TRANSPOTASI
9	MAKMUR	TOP
10	MEDAN JAYA	ANEKA JAYA
11	CV.PELANGI ATRAKANA	SUMBA PUTRA
12	PUTRA PELANGI	SAMOSIR PRIBUMI
13	RHEMA ABADI	PMP
14	SEMPATI STAR	YANTI GROUP
15	SAN	PELITA TRANSPORT
16	TKB	GUMARANG
17	PMS	SIBUAL-BUALI
18	PUTRA SIMAS	PASMA JAYA
19	RAJAWALI	KASMA JAYA
20	RAPI	BINTER TRANSPORT
21	PUTRI RIAU	RNS
22	SINAMAR TRANSPORT	BAHAGIA
23	HARMONIS/LINTRA	
24	SETANGKAI	
25	USAHA BARU	
26	HARMONI	
27	SARI JAYA	
28	PUTRA SAMOSIR JAYA	
29	LINTAU TRANSPORT	
30	INDAH KARYA	
31	KARMILA PRATAMA	
32	TABEK BIRU	
33	LUBUK BASUNG EXPRES	
34	SKR JAYA TRANSPORT	

Sumber: Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru 2018

Namun tidak memungkiri masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya dimana dalam hal ini penulis masih melihat bentuk sosialisasi dalam penertiban Perusahaan Oto Bus yang belum terlaksana dengan semestinya dengan kata lain

pengelola Perusahaan Oto Bus belum begitu faham atau adanya bentuk penolakan dalam peraturan yang berlaku, hal ini seperti yang sudah penulis jabarkan dalam fenomena yaitu masalah seperti naik turun penumpang sembarangan yang cenderung dilakukan di PO Bus luar terminal dengan alasan permintaan penumpang dan juga lokasi terminal yang jauh itu di kutip dari beberapa tanggapan penumpang ataupun pengella yang penulis temui di lapangan dalam observasi lapangan. Dan hal ini jelas melanggar peraturan.

Dalam hal ini pun pihak dinas terkait juga mengakui adanya bentuk penolakan terhadap peraturan yang berlaku yang penulis jabarkan dalam kesimpulan wawancara bersama pihak Koordinator Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Bapak Ahmad Juli Wira Bhakti, SE, MM :

“Dalam hal ini kita tidak memungkiri banyak PO Bus yang melanggar aturan dengan berbagai bentuk tindakan pelanggaran seperti kita lihat sekarang banyak perusahaan terkait yang melakukan tindakan penjualan tiket di luar terminal namun juga melakukan tindakan naik turun penumpang trayek, perlu di ketahui untuk penjualan tiket dengan loket di luar terminal tidak melanggar namun dengan langsung melakukan tindakan operasional itu melanggar beberapa prosedur yang sudah di dalam ketetapan dan disinilah pentingnya kita melakukan pengawasan langsung agar tertib dan kita dapat memperoleh efek langsung yang positif dari tindakan yang kita lakukan”

Dan hasil kesimpulan wawancara bersama kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Bapak S Ajie Panatagama, ATD, MT mengatakan bahwa:

“untuk terminal saat ini saya rasa kita sudah fungsikan semaksimal mungkin, dan bentuk pengawasan langsung yang kita lakukan sudah sesuai prosedur seperti inspeksi dengan sosialisai serta pengamatan dalam pelaksanaannya oleh BPTD untuk laporan dalam pelaksanaan pengawasan. Dan kita dari sini berharap kerjasama yang baik antar pengelola perusahaan bus untuk kooperatif agar terlaksananya moda transportasi yang nyaman dan aman seperti yang diharapkan, selain itu juga kita terus melakukan perbaikan dan modrenisasi terhadap terminal agar menarik animo masyarakat akan moda transportasi darat dan dapat bersaing dalam pelayanan dan fasilitas untuk pelayanan masyarakat dengan terminal lainnya di indonesia”

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk lisan dan tertulis.

Sehubungan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam hal indikator pengawasan tidak langsung seperti penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.9: Distribusi tanggapan Responden pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru mengenai indikator Pengawasan Tidak Langsung tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Sub indicator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Laporan Tertulis	11 (37%)	12 (40%)	7 (23%)	30 100%
2	Laporan Lisan	8 (27%)	16 (53%)	6 (20%)	30 100%
Jumlah		19	28	13	60
Rata-Rata		9	14	7	30
Persentase		30%	47%	23%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Dari Tabel V.9 diatas dapat diketahui untuk indikator pengawasan tidak langsung diperoleh tanggapan responden pemilik oto bus di Pekanbaru yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden dengan persentase 30%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 responden dengan persentase 47% dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 7 responden dengan persentase 23% maka secara keseluruhan untuk indikator pengawasan tidak langsung dari pemilik

perusahaan oto bus di Pekanbaru dari pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan dengan kategori cukup terlaksana dengan range dari 33% - 66%.

Dari hasil observasi dan data kuisioner, penulis mendapatkan hasil cukup terlaksana dari tanggapan responden atas indikator pengawasan tidak langsung dimana mereka menilai petugas terminal yang di bawah BPTD sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya seperti pendataan berkala yang sering petugas lakukan untuk mendata serta pemeriksaan, baik secara administrasi maupun izin operasional untuk pengelola PO Bus meski dengan waktu yang tidak menentu namun tetap ada tindakan dari petugas di lapangan.

Berikut hasil wawancara bersama pihak Koordinator Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Bapak Ahmad Juli Wira Bhakti, SE, MM :

“Bentuk pengawasan tidak langsung yang kita lakukan itu berupa laporan baik lisan ataupun tulisan yang didapatkan dari data pemilik PO Bus yang terdaftar laporan itu yang kemudian dijadikan acuan data dalam pengawasan terminal oleh pihak kita yang kemudian kita jadikan salah satu acuan untuk pengembangan ataupun pengawasan terminal. Hal ini dilakukan dengan jadwal tertentu yang sebelumnya telah kita tetapkan”

Dan hasil kesimpulan wawancara bersama kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Bapak S Ajie Panatagama, ATD, MT mengatakan bahwa:

“Selama ini pengawasan dalam bentuk pengawasan tidak langsung yang kita lakukan berupa laporan dari inspeksi oleh petugas dengan hasil laporan tersebut yang memuat berbagai hal disana kita jadikan acuan dalam kebijakan untuk pengawasan yang saudara tanyakan baik itu untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya terhadap terminal maupun sebagai proses memaksimalkan fungsi terminal dan disitu kita dapat mengambil langkah langkah dalam kebijakan terhadap terminal.”

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan pemilik perusahaan oto bus tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi

Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Persahaan Oto Bus di Pekanbaru tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengawasan Langsung	8 (27%)	14 (47%)	8 (26%)	30 100%
2	Pengawasan Tidak Langsung	9 (30%)	14 (47%)	7 (23%)	30 100%
Jumlah		17	28	15	60
Rata – rata		9	14	7	30
Presentase		30%	47%	23%	100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.10 diatas dapat diketahui mengetahui rekapitulasi diperoleh tanggapan responden pemilik perusahaan oto bus pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, yang terdiri dari 2 indikator yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 30%, atau ada 9 orang responden, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang responden, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah 23% atau ada 7 orang responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada hasil rekapitulasi dari 2 indikator yaitu Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik pengukuran

yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Terlaksana dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari hasil observasi dan data kuisisioner, penulis melihat adanya item penilaian cukup terlaksana yang diperoleh dari jumlah responden pemilik perusahaan oto bus di Pekanbaru sebanyak 14 orang responden atau persentase 47%, maka dapat diketahui bahwa hasil pelaksanaan pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam kegiatan pengawasan terhadap fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yaitu kurang terlaksana.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru kurang terlaksana karena berdasarkan pendapat responden yang di ukur dari 2 indikator yang ada, maka diharapkan kedepannya Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Serta segera mencari solusi terbaik terhadap setiap permasalahan yang ada dalam pengawasan terhadap terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kurang adanya tindak tegas yang berupa hukuman bagi PO Bus yang masih menyalahi aturan yang sudah ditetapkan saat inspeksi berlangsung.
2. Kurang adanya bentuk sosialisasi oleh pihak terminal terhadap masyarakat untuk mengfungsikan terminal dengan baik sebagai mana mestinya saat observasi berlangsung.
3. Berdasarkan observasi penulis, kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terminal ini tidak berfungsi, khususnya pada infrastruktur lampu penerangan karena minimnya lampu penerangan di sekitar terminal membuat para penumpang maupun supir angkutan umum merasakan ketidaknyamanan. Hal ini terlihat dari kondisi terminal yang gelap pada malam hari akibat kurangnya penerangan. Tentu saja ini membuat penumpang maupun supir angkutan umum khawatir dengan tindakan kriminal yang bisa saja terjadi ketika mereka berada di terminal.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang menggunakan indicator Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dilihat dari 2 (dua) indicator diatas yaitu :
 - a) Pengawasan Langsung dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indicator pengawasan langsung yaitu Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik

pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Terlaksana dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

- b) Pengawasan Tidak Langsung dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator Pengawasan Tidak Langsung yaitu Cukup Terlaksana dengan jumlah 47%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Terlaksana dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.
- c) Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada hasil rekapitulasi dari 2 indikator yaitu Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik pengukuran yang digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran **Cukup Terlaksana** dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%. Maka dapat diketahui bahwa hasil Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yaitu **cukup terlaksana**. Hal ini disebabkan karena kurangnya

kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak Pemilik Perusahaan Oto Bus (PO) dalam mendukung pencapaian sasaran target dalam bidang pengawasan terhadap fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sehingga dapat terlaksananya moda transportasi yang aman dan nyaman seperti yang diharapkan serta melakukan perbaikan dan modernisasi untuk menarik animo masyarakat akan moda transportasi darat.

2. Adanya hambatan dalam mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru yaitu :
 - a) Berdasarkan observasi penulis, perilaku supir dan penumpang ini sangat berpengaruh dalam berfungsi atau tidaknya terminal. Akibat tidak adanya penumpang tetap apabila supir masuk kedalam terminal, karena penumpang yang lebih memilih untuk naik dan turun di luar terminal, ini berdampak menurunnya penghasilan Pemilik Organda (PO) ataupun supir sehingga supir merasa lebih mendapatkan keuntungan apabila mereka menaikkan dan menurunkan penumpang tidak didalam terminal. Hal inilah yang menyebabkan terminal tidak berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana peruntukannya.
 - b) Berdasarkan observasi penulis, kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

terminal ini tidak berfungsi, khususnya pada infrastruktur lampu penerangan karena minimnya lampu penerangan di sekitar terminal membuat para penumpang maupun supir angkutan umum merasakan ketidaknyamanan. Hal ini terlihat dari kondisi terminal yang gelap pada malam hari akibat kurangnya penerangan. Tentu saja ini membuat penumpang maupun supir angkutan umum khawatir dengan tindakan kriminal yang bisa saja terjadi ketika mereka berada di terminal.

- c) Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru, dalam perjalanan pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki peran masyarakat menjadi kunci sukses dari terminal. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar terhadap suatu proses. Berdasarkan tujuan organisasi kepuasan masyarakat menjadi bukti keefektifan dari pengelolaan terminal. Namun dalam kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan fungsi terminal masihlah minim jika melihat perjalanan terminal selamaini.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kemenhub (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri) dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, maka dari hasil penelitian di atas penulis memberikan beberapa saran untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri yang akan datang yaitu :

1. Diharapkan kepada instansi yang berwenang dalam mengelola terminal melakukan pengawasan yang lebih tegas lagi terhadap PO bus yang beroperasi di terminal agar benar-benar beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan selama berada di terminal. Begitu juga instansi yang berwenang terhadap pengawasan angkutan diluar terminal agar lebih rutin lagi dalam melakukan penyidikan sehingga titik-titik rawan dari terminal bayangan dapat semakin dipersempit.
2. Seharusnya pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dapat memberi sanksi secara lebih tegas terhadap supir bus yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera dari supir bus tersebut.
3. Untuk pengelolaan terminal yang membutuhkan koordinasi diharapkan pihak pengelola lebih instens lagi dalam berkoordinasi baik itu dengan Kepolisian maupun Kodim agar segala bentuk masalah keamanan di terminal bisa lebih diminimalisir. Begitu juga dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri agar lebih intens lagi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar pengawasan terhadap angkutan umum yang beroperasi di terminal bisa segera diatasi dan semua angkutan masuk kedalam terminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anwari, Insyirah. "Tugas. Manajemen. Publik." https://www.academia.edu/TUGAS_Manajemen_Publik?auto=download (diakses tanggal 31 Maret 2018)
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung; Alfabeta
- Wirman Syafri. 2012. *Study Tentang Administasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Effendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Erni Tisnawati & Kurniawati Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasibuan S.P Malayu. 2009. *Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara
- Herujito, Yayat. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta. Grasindo
- Manullang, M, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gadjah mada university press
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen. Pekanbaru*. UNRI Press
- Martono, Nanang. 2016. *Motode Penelitian Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Djambatan

Santosa, Panji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.

Bandung, PT. Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara

_____ 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

_____ 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (cetakan 15).

Jakarta: Bumi Aksara.

Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra

Wicana Media

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Mandar Maju

Syafeii, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta. Grasindo

_____ 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT. Perca

Terry, G.R. 2010. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta. Kencana

Zulkifli, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru; Marpoyan Tujuh

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau